

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis mengenai pengaruh penerapan undang-undang no.36 tahun 2008 tentang tarif pasal 17 terhadap kepatuhan pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berlakunya tarif pasal 17 mulai 1 Januari 2009 dapat meningkatkan jumlah kepatuhan pelaporan perpajakan menurut persentase tetapi tidak mencapai target rasio yang telah ditetapkan..
2. Adanya perbedaan lapisan tarif yang cukup jelas, sebelum undang-undang berubah tarif pasal 17 memiliki lima lapisan tarif tetapi setelah undang-undang berubah tarif tersebut memiliki empat lapisan.
3. Terdapat peningkatan jumlah pelapor antara tahun 2008 dengan tahun 2009 yaitu sebesar 3,35% menurut persentase, sedangkan dilihat dari tingkat rasio kepatuhan tidak ada yang mencapai target.

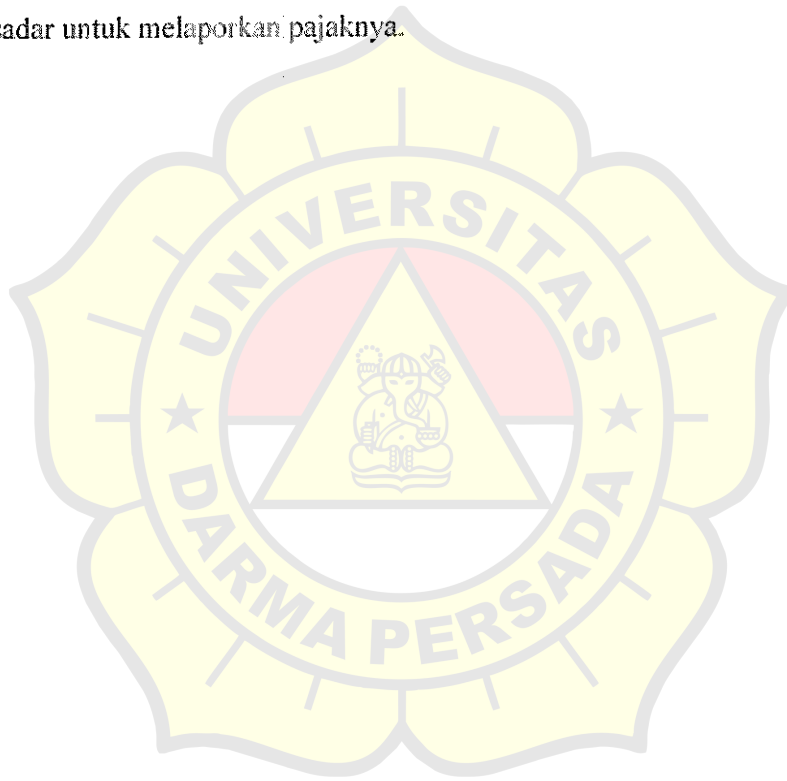
5. Pelaporan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup berarti, tetapi peningkatan pelaporan pajak dalam kurun waktu 5 tahun terdapat pada tahun 2010 menurut persentase, sedangkan dari tingkat rasio kepatuhan tahun 2010 tidak mencapai target yang telah ditentukan.
6. Terdapat peningkatan keefektifan Wajib Pajak yang semakin meningkat yang disebabkan karena kesadarannya akan melaporkan pajak. Jumlah keefektifan Wajib pajak yang paling tinggi terdapat pada tahun 2010.
7. Tingkat keefektifan Wajib Pajak setelah undang-undang berubah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

#### A. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar Wajib Pajak dapat berperan aktif dalam upaya peningkatan pelaporan pajaknya maka pemerintah harus menerapkan undang-undang sesuai dengan peraturan yang ada yang sudah dibebankan kepada Wajib Pajak.
2. Penggunaan kebijakan – kebijakan dalam upaya peningkatan jumlah pelaporan pajak dapat dilaksanakan dengan baik oleh fiskus (pegawai pajak) maupun Wajib Pajak.
3. Agar Wajib Pajak dapat mengetahui bahwa perubahan undang-undang tidak hanya menguntungkan pemerintah tetapi dapat mengurangi beban pajak bagi wajib pajak perlu himbauan dari petugas pajak itu sendiri.

4. Petugas pajak harus dapat menghimbau kepada para Wajib Pajak bahwa melaporkan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik.
5. Jumlah pelapor tiap tahunnya tidak ada yang mencapai target tetapi jika dilihat dari jumlah persentase tiap tahun ada peningkatan. Pemerintah dan petugas pajak harus bisa memberikan himbauan agar para Wajib Pajak lebih sadar untuk melaporkan pajaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Soekrisno. 2007. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Firtiandi, Primandita, dkk. 2009. *Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Judisseno, Rimsky K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia "Suatu Pengantar"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media.

Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.

Remi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Suprapomonodan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

### Internet









[Http://www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (10 Juni 2012)

[Http://www.Scribd.com](http://www.Scribd.com) (25 Juni 2012)

[Http://www.hukumpajak.com](http://www.hukumpajak.com) (2 Juli 2012)


**LEMBAR KONSULTASI**  
**BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : Hafsa Anggraini  
 No. Induk Mhs : 08420012  
 Dosen Pembimbing : Drs. Boedi Setyo Hartono, Akt. MM  
 Tanggal Bimbingan : 28 Mei 2012  
 Terakhir Bimbingan : Selasa, 17 Juli 2012


No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Bab.Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	Senin, 28 Mei 2012	BAB I Pendahuluan	
2	Kamis, 31 Mei 2012	Revisi BAB I	
3	Kamis, 7 Juni 2012	BAB II dan BAB III	
4	Senin, 11 Juni 2012	Revisi BAB II dan BAB III	
5	Senin, 18 Juni 2012	mengajukan BAB IV dan V	
6	Kamis, 5 Juli 2012	Revisi BAB IV dan BAB V	
7	Senin, 16 Juli 2012	Revisi BAB I sampai BAB V	
8	Selasa, 17 Juli 2012	Final selasai BAB I dan BAB V	

Jakarta, 17 Juli 2012

Mengetahui Kajur,

  
 (Atif Isniawati, Akt. M.) s.d

Pembimbing,

  
 (Drs. Boedi Setyo Hartono, Akt. MM)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU  
Jalan Pulobuaran VI Blok JJ No.11 KIP Jakarta Timur-13290  
Telp.021-46826683-87 Fax.021-46826685

17 April 2012

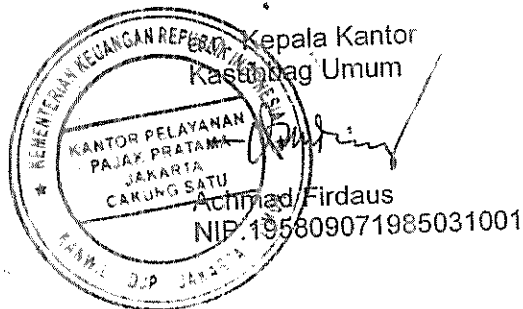
Nomor : S-19 /WPJ.20/KP.04/2012  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Praktek Kerja Lapangan a.n.  
Hapsah Angraini

Yth. Kajur Akuntansi  
Universitas Darma Persada  
Jalan Raden Inten II Pondok Kelapa  
Jakarta Timur 13450.

Sehubungan surat dari Pimpinan Uneversitas Darma Persada Nomor :243/Riset/FE-UNSDA/III/12 tanggal 29 Maret 2012 hal permohonan riset /PKL dengan ini disampaikan :

1. Pada dasarnya permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang Saudara ajukan dapat kami setujui;
2. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.BT6/1996 mengenai ijin Praktek Kerja Lapangan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa PKL adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap mahasiswa tidak diijinkan melakukan PKL mengenai hal-hal yang berkaitan dengan data Wajib Pajak, baik perseorangan maupun badan;
  - b. Setiap mahasiswa harus memenuhi tata tertib dan petunjuk yang diberikan oleh pembibing yang bersangkutan;
3. Jadwal Praktek Kerja Lapangan (PKL) tersebut dilaksanakan 1 (satu) bulan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kp : KP.04/KP.0401

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 – 42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

: S-1606/WPJ.20/2012  
: Biasa  
an : -  
: Pemberian Izin Riset

9 Juli 2012

kan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada  
an Radin Inten II Pondok Kelapa  
arta 13450

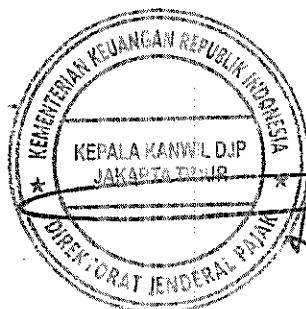
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 282/RISET/FE-UNSDA/VI/2012 tanggal  
2012 hal permohonan untuk mengadakan riset, atas:

Nama : Hapsah Anggraini  
NPM : 08 42 0012

ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan  
set pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, sepanjang bahan-bahan keterangan/data  
dapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak  
ngkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar  
memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi  
*Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut :  
[takaan@pajak.go.id](mailto:takaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Hario Damar  
NIP 060066594



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU

Jln. Pulo Buaran 6 Blok JJ No. 11  
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930

Telepon : (021) 4682668-86  
Faksimili : (021) 46826685

**Daftar Pelaporan Pajak Dari Tahun 2006 – 2010 Pada KPP Pratama**

**Jakarta Cakung Satu**

Wajib Pajak	Keterangan	Tahun Pajak					Grand Total
		2006	2007	2008	2009	2010	
Orang Pribadi	Karyawan	1.027	6.514	22.114	24.837	25.300	79.792
	Non karyawan	229	242	400	406	320	1.597
Orang Pribadi Total		1.256	6.756	22.514	25.243	25.620	81.389
Grand Total		1.256	6.756	22.514	25.243	25.620	81.389



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU

Jln. Pulo Buaran 6 Blok JJ No. 11  
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930

Telepon : (021) 4682668-86  
Faksimili : (021) 46826685

Tabel Target Rasio kepatuhan tahun 2010

No	Unit Kerja dan Pengelompokan	Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2010		
		Sebelumnya (SE-10/PJ/2010)	Revisi	Keterangan
<b>A. Kanwil DJP</b>				
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	97,50%	97,50%	Tetap
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus	95,00%	95,00%	Tetap
3	Kanwil DJP lainnya yang berada di:			
	DKI Jakarta	65,00%	67,50%	Berubah
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali	60,00%	62,50%	Berubah
	Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya)	57,50%	60,00%	Berubah
	Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya)	55,00%	57,50%	Berubah
<b>B. Kantor Pelayanan Pajak</b>				
1	KPP Wajib Pajak Besar	97,50%	97,50%	Tetap
2	KPP Madya yang berada di:			
	DKI Jakarta	95,00%	95,00%	Tetap
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali	92,50%	92,50%	Tetap
	Luar Pulau Jawa dan Bali	90,00%	90,00%	Tetap
3	KPP Pratama yang berada di:			
	DKI Jakarta	65,00%	67,50%	Berubah
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali	60,00%	62,50%	Berubah
	Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya)	57,50%	60,00%	Berubah
	Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua (dan sekitarnya)	55,00%	57,50%	Berubah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU

Jln. Pulo Buaran 6 Blok JJ No. 11  
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930

Telepon : (021) 4682668-86  
Faksimili : (021) 46826685

Tabel Target Rasio kepatuhan tahun 2011

No	Unit Kerja dan Pengelompokan	TARGET RASIO TAHUN 2011
		SPT TAHUNAN PPh
<b>A. Kanwil DJP</b>		
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	97,50%
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus	95,00%
3	Kanwil DJP lainnya yang berada di:	
	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II	70,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II)	67,50%
	Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali (dan sekitarnya)	62,50%
	Pulau Kalimantan	62,50%
	Pulau Nusa Tenggara dan Papua	60,00%
<b>B. Kantor Pelayanan Pajak</b>		
1	KPP Wajib Pajak Besar	97,50%
2	KPP Jakarta Khusus	95,00%
3	KPP Madya yang berada di:	
	DKI Jakarta	95,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali	95,00%
	Luar Pulau Jawa dan Bali	92,50%
4	KPP Pratama yang berada di:	
	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II	70,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II)	67,50%
	Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya) dan Pulau Bali	62,50%
	Pulau Kalimantan	62,50%
	Pulau Nusa Tenggara dan Papua (dan sekitarnya)	60,00%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA CAKUNG SATU

Jln. Pulo Buaran 6 Blok JJ No. 11  
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930

Telepon : (021) 4682668-86  
Faksimili : (021) 46826685

Tabel Target Rasio kepatuhan tahun 2012

No	Unit Kerja dan Pengelompokan	TARGET RASIO TAHUN 2011
		SPT TAHUNAN PPh
<b>A. Kanwil DJP</b>		
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	97,50%
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus	95,00%
3	Kanwil DJP lainnya yang berada di:	
	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II	70,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II)	67,50%
	Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Bali (dan sekitarnya)	62,50%
	Pulau Kalimantan	62,50%
	Pulau Nusa Tenggara dan Papua	60,00%
<b>B. Kantor Pelayanan Pajak</b>		
1	KPP Wajib Pajak Besar	97,50%
2	KPP Jakarta Khusus	95,00%
3	KPP Madya yang berada di:	
	DKI Jakarta	95,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) dan Bali	95,00%
	Luar Pulau Jawa dan Bali	92,50%
4	KPP Pratama yang berada di:	
	DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II	70,00%
	Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah I dan Jawa Tengah II)	67,50%
	Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi (dan sekitarnya) dan Pulau Bali	62,50%
	Pulau Kalimantan	62,50%
	Pulau Nusa Tenggara dan Papua (dan sekitarnya)	60,00%